

Sosialisasi jelang Pemilu Legislatif pada Televisi Lokal: Partisipasi Perempuan di Panggung Politik

Ida Ri'aeni¹, Uun Machsunah²

¹Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP

²Prodi Hubungan Masyarakat, FISIP

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Gedung Machdor, Jl. Fatahillah No.40, Cirebon

Corresponding author's email: uun.machsunah@umc.ac.id

No. HP, WhatsApp: 081324188285

Submitted: Februari 2020 | Accepted: 26 Maret 2020 | Published: 20 April 2020

P-ISSN 2686-0376 | E-ISSN 2714-6626 |

Website: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SWA/index>

Abstrak

Partisipasi perempuan di kancah politik lokal di Cirebon masih di bawah angka 30%. Perempuan seringkali dianggap sebagai pelengkap aturan keterwakilan perempuan dalam partai politik. Dalam kenyataannya, kaum perempuan yang terpanggil dalam kancah politik di kota dan kabupaten Cirebon tampaknya terus berupaya menampilkan kemampuannya. Pada program Selamat Pagi Cirebon (SPC) di Radar Cirebon Televisi, permasalahan perempuan yang berkiprah di panggung politik berusaha untuk diurai. Media televisi sebagai *public sphere*, menjadi wadah dalam sosialisasi tentang bagaimana idealnya kiprah perempuan dalam bidang politik. Partai politik semestinya melakukan pendidikan politik, proses kaderisasi dan pelatihan agar lahir kader perempuan yang mumpuni. Hasilnya, dari tahun ke tahun; jumlah partisipasi politik perempuan dalam bidang legislatif menunjukkan angka peningkatan.

Kata Kunci: komunikasi efektif, komunikasi politik, sosialisasi, partisipasi perempuan.

A. PENDAHULUAN

“Haruskah perempuan terlibat dalam politik?” Selain sebuah pertanyaan, ini juga merupakan tantangan bagi kaum perempuan. Di Indonesia khususnya, keterlibatan perempuan dalam politik masih terasa sangat rendah. Suara-suara Kartini muda kadang segelintir saja yang terdengar “gaung”-nya. Kalaupun ada, sering “kalah pamor” dari laki-laki. Itu karena sebagai perempuan, selalu ter subordinasi, termarginalkan. Suara perempuan memang lantang, tapi akhirnya cuma menguap saja di forum-forum, rapat, diskusi, selalu merasa diremehkan. Kenapa? Ya karena dia perempuan.

Selain peran domestik (yang sebetulnya tidak perlu dibeda-bedakan), perempuan memiliki fungsi dan peran yang penting yang strategis dalam masyarakat. Peran dan fungsi ini selalu ramai diperdebatkan dalam forum diskusi aktivis, pegiat LSM. Kalau kita benar-benar mau mengikuti pemahaman gender, mengimplementasikannya dengan penuh kesadaran untuk mencapai persamaan hak, maka perempuan juga bisa ber-politik. Namun demikian, untuk mencapai hal itu membutuhkan jalan panjang dan berliku-liku. Ada empat poin yang selalu menjadi permasalahan, yaitu :budaya patriarki, edukasi, motivasi, dan *acceptancy*(penerimaan).(www.balisturi.com)

B. FOKUS MASALAH

Pandangan masyarakat tentang perempuan yang seringkali tidak bisa tampil di publik, menjadikan kaum perempuan dituntut untuk mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai tokoh publik. Partisipasi perempuan di kancah politik lokal di Cirebon masih di bawah angka 30%. Perempuan seringkali dianggap sebagai pelengkap aturan keterwakilan perempuan dalam partai politik. Dalam kenyataannya, kaum perempuan yang terpanggil dalam kancah politik di kota dan kabupaten Cirebon tampaknya terus berupaya menampilkan kemampuannya. Hasilnya, dari tahun ke tahun; jumlah partisipasi politik perempuan dalam bidang legislative menunjukkan angka peningkatan.

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik. (www.wri.or.id)

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan televisi lokal, yaitu Radar Cirebon Televisi pada program acara Selamat Pagi Cirebon (SPC). Kegiatan ini mengudara setiap hari Senin-Jumat, pukul 08.00-09.00 WIB dengan pembawa acara Afif Rivai.

D. PEMBAHASAN

Media televisi sebagai *public sphere*, menjadi wadah dalam sosialisasi tentang bagaimana idealnya kiprah perempuan dalam bidang politik. Ruang publik dipahami sebagai ruang kehidupan. Meminjam konsep Habermas tentang ruang publik (*public sphere*), bahwa manusia selalu berada dalam ruang kehidupan. Dalam ruang hidup tersebut ada proses interaksi dan komunikasi dengan sesama dalam sebuah ruang pula, inilah yang disebut ruang publik. Habermas mengatakan, semua wilayah atau ruang kehidupan sosial yang memungkinkan adanya terbentuk pendapat umum (*public opinion*) dapat dipahami sebagai ruang public. Berkaca pada pemikiran Habermas, posisi media massa awalnya menjadi sarana atau distribusi informasi dalam ruang publik. Media massa menjadi katarsis (perekat) kepentingan yang berjalan dalam logika ruang publik. Sehingga, posisi media massa masih sebagai perpanjangan tangan dari manusia; dalam konteks ruang publik tentu saja pemerintah dan masyarakat, karena itu apakah bisa dikatakan ruang public adalah sebuah ruang yang hilang, hanya kita sendiri yang bisa menjawab. (Tricana, 2013) Keberadaan pers menjadi ruang bagi publik dalam memperoleh maupun menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Dasar ontologis mengenai masyarakat pada hakikatnya dapat menjadi titik tolak dalam memahami konsep *civil society* sebagaimana yang sekarang sedang berkembang. (Supriyadi, 2013)

Di Cirebon, pengalaman narasumber dan masyarakat yang terlibat dalam diskusi; banyak kaum perempuan yang terlibat dalam politik harus membayar mahal agar mampu tampil sebagai calon anggota legislaif. Untuk bisa maju menjadi anggota legislative, tentu perjuangan yang dilakukan akan lebih sulit lagi. Perempuan harus bersaing dengan calon anggota legislative yang lain dan juga meminimalisir stigma dalam masyarakat tentang ketidakmampuan perempuan dalam berkiprah secara luas.

Terkadang, perempuan anggota calon anggota legislatif ini dianggap sebagai ‘gula-gula’ atau ‘artis dadakan’. Sebutan itu dilontarkan oleh masyarakat yang skeptis dengan kemampuan para perempuan yang menjadi kandidat dalam pemilihan calon legislative. Publik menganggap perempuan tersebut tidak dikenal kiprahnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, namun muncul tiba-tiba dalam poster dan baligo sebagai calon anggota dewan. Beberapa anggota dewan perempuan yang saat ini menjabat di DPRD Tingkat II dianggap kurang mampu

mengakomodir kepentingan rakyat dan jarang tampil di depan publik, membuat masyarakat cenderung ragu terhadap kemampuan perempuan secara umum. Hanya beberapa anggota legislatif perempuan saja yang saat ini dianggap mampu berkiprah sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Selebihnya, kiprah mereka nyaris tak terdengar di masyarakat. Padahal, generalisasi seperti ini tidak semestinya terjadi ketika para tokoh politik yang ada mampu menunjukkan kemampuannya. Selain itu, hak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia yang dimiliki juga oleh setiap perempuan yang berminat di kancah politik. Hak asasi tersebut juga berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Perempuan di panggung Politik pada Program SPC di Radar Cirebon TV



Pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi semakin mendapatkan tempat dan terbuka luas seiring dengan pesatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, yang memberikan dampak radikal bagi penikmatan hak atas kebebasan berekspresi. Navi Pillay (2011) menyatakan internet merupakan tren global yang paling kuat, dan hal tersebut telah menghadirkan suatu tantangan HAM yang sangat kompleks. Internet telah menghapuskan berbagai upaya untuk membentuk monopoli informasi dan berita, sehingga mampu mendorong beragam pengambilan keputusan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks pemajuan hak asasi manusia, besarnya pengguna internet ini telah melahirkan banyak peluang, dia menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Internet merupakan salah satu komponen utama dari ‘revolusi informasi’, karena internet dapat memainkan peran yang berpengaruh dalam menginformasikan suara-

suara yang berbeda, sehingga menciptakan debat politik dan budaya yang dinamis. (www.elsam.or.id)

UN Women atau organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang perempuan, merilis data tentang 'Perempuan dalam Politik: 2017'. Persentase perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam parlemen dan kabinet jadi dasar dalam publikasi ini.

Data ini dirilis pada April 2017 berdasarkan kondisi pada 1 Januari 2017. Sementara untuk data tahun 2018 belum dirilis. Merujuk pada data tersebut, adalah Bulgaria, Prancis, dan Nikaragua yang menempati posisi pertama dalam persentase perempuan di kabinet. Ketiga negara tersebut memiliki 9 menteri perempuan dari 17 kursi di kabinet atau ada 52,9% keterwakilan perempuan di tingkat eksekutif nasional. Berdasarkan jumlah, ada Kanada dan Afrika Selatan yang memiliki 15 menteri perempuan. Namun di Kanada ada 30 kursi menteri, kemudian Afrika Selatan ada 36. (news.detik.com)

Bagaimana dengan posisi Indonesia? PBB menempatkan Indonesia di posisi 46 soal jumlah keterwakilan perempuan di kabinet. Menurut catatan PBB saat itu, Indonesia punya 9 menteri perempuan dari 35 kursi di kabinet atau 25,7%. Padahal saat ini di Indonesia tercatat ada 34 menteri. Ada pun menteri wanita di Kabinet Kerja adalah Menko PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise. Sebelumnya ada Khofifah Indar Parawansa di posisi Menteri Sosial, namun dia mengundurkan diri dari kabinet untuk mengikuti ajang Pilkada Jawa Timur 2018. (news.detik.com)

Berdasarkan data PBB, perempuan pada kabinet seluruh dunia paling banyak menduduki posisi menteri di bidang lingkungan/sumber daya alam/energi yakni sebanyak 108 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah menteri yang membawahi informasi/media, yakni hanya 10 orang. Ada 11 kepala negara dan 11 kepala pemerintahan perempuan di dunia yang tercatat oleh PBB. Mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye masih dihitung oleh data tersebut. PBB juga mencatat soal jumlah Ketua DPR perempuan di dunia. Rupanya pada tahun 2017 ada 53 Ketua DPR perempuan di seluruh dunia. Selain itu ada 158 orang Wakil Ketua DPR wanita. (news.detik.com)

Di Indonesia, seluruh pimpinan DPR merupakan laki-laki. Meski demikian berdasarkan data BPS ada 97 dari 560 anggota DPR yang merupakan wanita. Indonesia menduduki peringkat 99 di dunia soal persentase jumlah anggota DPR perempuan dan laki-laki. Namun

data PBB saat itu mencatat jumlah anggota dewan wanita di Indonesia ada 111 orang atau 19,8%. Indonesia berada satu peringkat di bawah Arab Saudi yang keterwakilan perempuan di parlemen adalah 19,9% atau 30 dari 151 kursi.

Peringkat pertama diduduki oleh Rwanda dengan jumlah 49 anggota dewan wanita dari 80 kursi (61,3%). Pada posisi kedua ditempati oleh Bolivia yang tingkat keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai 53%. Posisi Amerika Serikat justru berada di bawah Indonesia. Di AS, ada 83 anggota dewan perempuan dari 435 kursi (19%) sehingga menempatkannya di peringkat 104. Sementara itu di Senat AS, ada 21 perempuan dari 100 anggota.

Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. (www.tirto.id)

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009. (www.tirto.id)

Masih kurangnya representasi perempuan dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota dalam rangka meningkatkan kemungkinan keterpilihan perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua Dapil. Tak hanya itu, perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting, sebab UU Partai Politik dan Pemilu ini merupakan salah satu parameter dalam melihat respons negara terkait kesetaraan gender.

E. Simpulan

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya. Perempuan semestinya tidak dianggap ‘gula-gula’ atau pemanis semata, tapi harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam bidang politik. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari banyak pihak; juga usaha dari kandidat perempuan untuk menunjukkan kapasitasnya.()

Referensi:

<http://www.balisruti.com/perempuan-dan-politik-antara-realita-dan-harapan.html>
<https://elsam.or.id/kebebasan-berekspresi-di-indonesia-hukum-dinamika-masalah-dan-tantangannya/>
<https://news.detik.com/berita/d-3904549/membandingkan-perempuan-dalam-politik-di-indonesia-dan-dunia>, Kamis 08 Maret 2018, 07:45 WIB
<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>
<https://www.wri.or.id/publikasi/lembar-fakta/343-partisipasi-politik-perempuan-sebuah-keharusan.html>

Supriadi, Yadi. Kajian Jurnalisme ISSN 2549-0559 (cetak) ISSN 2549-1946 (online) Volume I Nomor 1 Tahun 2017 <http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme> 1 Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas.

TRICANA, Deny Wahyu. MEDIA MASSA DAN RUANG PUBLIK (Public sphere), SEBUAH RUANG YANG HILANG. **ARISTO**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 8 - 13, dec. 2013. ISSN 2527-8444. Available at: <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1538>>. Date accessed: 06 Februari 2020. doi:<http://dx.doi.org/10.24269/ars.v1i1.1538>.